

Tinjauan Atas Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Hardini Lestiani Hernusa, Fidira Cliveuro Sukkey
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan
Email : dirasukkey26@gmail.Com

ABSTRACT

Value for Money is a method or way to measure the financial performance of public sector organizations to help improve future performance and help local governments focus on their goals. The aim of this research is to measure financial performance at the Bogor Regency Manpower Service in 2020-2022 using the value for money principle which consists of economic ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios. The results of the review show that in the budget realization report based on these transactions, it can be seen that the financial performance of the Bogor Regency Manpower Office each year experiences increases or decreases when measured by economic, efficiency and effectiveness ratios. The financial performance of the Bogor Regency Manpower Service can be said to be good because it is economical and effective. However, the financial performance of the Bogor Regency Manpower Service cannot be said to be efficient.

Keywords: Financial performance measurement, disnaker

ABSTRAK

Value for Money adalah salah satu metode atau cara untuk mengukur kinerja keuangan organisasi sektor publik untuk membantu memperbaiki kinerja di masa depan dan membantu pemerintah daerah fokus pada tujuan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2020-2022 dengan menggunakan prinsip value for money yang terdiri atas rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Hasil dari peninjauan menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran berdasarkan transaksi tersebut dapat terlihat kinerja keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor setiap tahunnya ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan jika diukur dengan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dapat dikatakan baik karena sudah ekonomis dan efektif. Akan tetapi kinerja keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor belum dapat dikatakan efisien.

Keywords : Pengukuran kinerja keuangan, disnaker

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, kinerja suatu organisasi sektor publik banyak menjadi perhatian. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka terima untuk layanan atau kinerja yang diberikan oleh organisasi sektor publik karena mereka menjadi lebih cerdas dalam mengevaluasi efektivitas organisasi sektor publik. Masyarakat bertanya-tanya apakah uang yang digunakan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari program-program yang dilaksanakan. Karena kurangnya transparansi pada setiap akuntabilitas informasi keuangan yang dilakukan di dalam perusahaan, publik mulai kehilangan kepercayaan pada organisasi sektor publik. Banyak orang percaya bahwa lembaga pemerintah adalah sarang limbah dan sumber kebocoran dana. Hal ini menimbulkan fenomena dimana organisasi sektor publik lebih menekankan pada *value for money* yang secara bersamaan mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* dalam organisasi sektor publik. Sebagai entitas sektor publik, tugas utama pemerintah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena meningkatnya pengetahuan

publik tentang penggunaan administrasi publik kini kinerja instansi pemerintah sedang menjadi sorotan. Tuntutan semakin meningkat terhadap kewajiban para penyelenggara atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 membentuk reformasi kelembagaan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, tanggap, dan akuntabel.. Dalam situasi ini, tugas pemerintah adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas Tindakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi di sektor publik berbeda dari sektor swasta dalam hal kualitas dan karakteristik mereka. Ciri khas dari organisasi sektor publik ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Organisasi sektor publik dapat memberikan layanan kepada publik dalam hal untuk memenuhi semua jenis kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik memiliki tujuan yang bersifat non profit, sehingga melayani publik adalah tugas paling penting yang harus diselesaikan. Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada publik dan parlemen. Anggaran yang dimiliki organisasi sektor publik terbuka untuk umum karena semua dana bersumber dari dompet publik. Hartono (2014)

Penyusunan, pengolahan, pengaturan serta pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan suatu organisasi, salah satunya yaitu organisasi sektor publik. Manajemen keuangan akan memiliki dampak positif atau negatif terhadap kdelangsungan organisasi untuk tetap bertahan. Ketika organisasi sektor publik dikelola sesuai rencana dan tujuan yang berlandaskan karakteristik, maka organisasi sektor publik akan bertahan dan bahkan berkembang. Sebaliknya, organisasi sektor publik akan mengalami dampak negatif yaitu tujuan yang direncanakan sebelumnya tidak akan tercapai jika manajemen ceroboh atau tidak sesuai engan tujuan organisasi.

Sejak ditetapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Sistem pengelolaan keuangan yang baik dan andal diperlukan untuk memastikan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerahh dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Salah satu cara dalam mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara adalah dengan menggunakan konsep *Value for Money*.

Administrasi perekonomian daerah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan suatu daerah untuk menentukan kegiatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengelolaan ekonomi daerah harus dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas keuangan atau *value for money*, serta transparansi, akuntabilitas, pemerataan dan partisipasi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya keuangan berupa dana yang sesuai dengan anggaran pemerintah daerah.

Dalam organisasi manapun, kinerja merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan. Setiap organisasi memiliki kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja. Hal ini dapat berupa apa saja tujuan atau target yang ingin dicapai. Untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara ekonomis, efisien, dan efektif, pengukuran kinerja harus dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik operasional organisasi. Kinerja merupakan salah satu isu yang sangat penting dipelajari dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak dilaksanakannya penganggaran berbasis kinerja semua pemerintah daerah harus menjalankan kewajibannya dengan baik dalam pemerintah daerah setelah ditetapkannya penganggaran berbasis kinerja. Diharapkan peningkatan tuntutan untuk akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit kerja negara, kementerian, dan lembaga pemerintah akan mengurangi pemborosan dan kehilangan dana serta mengungkap program yang tidak ekonomis.

Evaluasi kinerja sangat penting gunanya untuk mengetahui apakah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor telah melaksanakan program kerjanya dengan baik. Terutama realisasi terhadap program-program yang manfaatnya berhubungan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor merupakan instansi yang kegiatannya berhubungan langsung dengan segala bidang kehidupan dan keberhasilannya didasarkan pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ketenagakerjaan. Dengan menggunakan analisis *value for money* dapat dilihat seberapa besar presentase efisiensi dan efektifitas atas perolehan target pendapatan dan biaya dengan membandingkan alat pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.

Menurut Halim et al. (2014) “Value for Money adalah konsep untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi, yaitu ekonomi terkait sejauh mana organisasi sektor publik meminimalkan *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi terkait pencapaian *output* yang maksimum. Dengan input tertentu atau menggunakan input yang paling rendah untuk mencapai *output* tertentu dan efektivitas untuk mencapai hasil program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Tujuan yang diinginkan berhubungan dengan pelaksanaan *value for money* yaitu, ekonomi dalam perolehan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Semua informasi yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan antara output dan laporan keuangan. Permasalahan yang timbul adalah bahwa output tidak dapat langsung dihubungkan langsung ke output kinerja keuangan. Pemeriksaan tahunan tidak mensyaratkan kelengkapan informasi yang diterima tentang program sosial yang di danai. Khalikussabir (2016)

Dalam organisasi sektor publik, kinerja keuangan merupakan topik penelitian yang sangat penting. Setelah diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, setiap organisasi sektor publik khususnya pemerintahan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja keuangan yang baik. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah harus memiliki informasi tambahan tentang kinerja instansi pemerintah, termasuk kinerja yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor menyusun laporan keuangan tahunan seperti laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang kemudian disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pemerintah. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasionalnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor memiliki anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagai pengeluaran instansi.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja lembaga pemerintah. Laporan realisasi anggaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat sangat membantu dalam menilai kinerja keuangan. Mereka memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada laporan neraca.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran, merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah yang sangat penting karena APBN merupakan tulang punggung pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian, serta evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk mencapai tiga tujuan : Pertama, pengukuran kinerja membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, yang pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Yang kedua menyangkut alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, menerapkan akuntabilitas publik dan komunikasi kelembagaan ditingkatkan. Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang sangat penting dari setiap instansi daerah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor adalah salah satu instansi pemerintah yang ada di kabupaten bogor yang memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bogor, kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di bawah ini :

Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	3.510.000.000	4.825.071.488	147,27
2021	3.744.000.000	3.652.068.400	97,54
2022	6.447.600.000	0	0,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Tabel 1.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2020-2022

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	17.165.128.796	13.966.344.484	96,57
2021	14.969.509.304	14.680.699.835	98,07
2022	23.612.649.918	15.876.663.897	94,73

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yaitu pendapatan pada tahun 2020 terealisasi 147,27% melampaui target anggaran, dan belanja terealisasi sebesar 96,57%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan pada tahun 2021 menurun yaitu terealisasi 97,54% dan realisasi belanjanya 98,07%. Dan realisasi pendapatan tahun 2022 belum bisa diukur karena realisasi pendapatan masuk ke pemerintah pusat dan untuk peraturan daerah nya masih disusun, dan untuk realisasi belanjanya sebesar 94,73%.

Laporan realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya, sementara itu belanja daerah juga turun setiap tahunnya. Jadi, secara umum bisa dilihat bahwa meskipun pengelolaan keuangannya belum efisien, tetapi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sudah baik karena ekonomis dan efektif.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2020-2022 jika ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

METODE PENELITIAN

Dalam pengerjaan dan penyusunan penelitian ini penulis melakukan kegiatan penelitian ini yang dilaksanakan di salah satu instansi pemerintahan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Bersih No. 2, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914. Waktu dan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Mei 2023, dengan jadwal kegiatan magang yaitu setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 WIB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Kinerja Keuangan

Penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2020-2022 dengan menggunakan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Ekonomi merupakan analisis realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Untuk mengukur tingkat ekonomis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{13.966.344.484}{17.165.128.796} \times 100\% \\ = 81,36\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{14.680.699.835}{14.969.509.304} \times 100\% \\ = 98,07\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{15.876.663.897}{23.612.649.918} \times 100\% \\ = 67,24\%$$

Tabel 3.5
Rasio Ekonomis
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2020	17.165.128.796,00	13.966.344.484,00	81,36%
2021	14.969.509.304,00	14.680.699.835,00	98,07%
2022	23.612.649.918,00	15.876.663.897,00	67,24%

Berdasarkan tabel 3.6, maka rasio ekonomis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan rasio ekonomis masing-masing sebesar 81,36%, 98,07% dan 67,24%. Untuk tahun 2020 termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada antara 80% sampai 90%, untuk tahun 2021 termasuk dalam kategori Ekonomis karena berada diantara 90% sampai 100%, dan untuk tahun 2022 termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai 80%.

Anggaran belanja tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 begitu juga realisasi belanja yang ikut mengalami kenaikan, hal ini dibuktikan dengan perhitungan rasio ekonomis bahwa tingkat ekonomis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor mengalami penurunan. Akan tetapi, walaupun mengalami penurunan tingkat ekonomis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor telah melakukan penghematan belanja seriap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran bahwa setiap tahunnya anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah memenuhi syarat ekonomis.

Rasio ekonomis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tahun 2020 sampai tahun 2022 terus mengalami fluktuatif. Dengan dilakukannya dengan membandingkan realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya.

Untuk mengukur tingkat efisiensi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, pengukuran ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{13.966.344.484}{4.825.071.488} \times 100\% = 289,45\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{14.680.699.835}{3.652.068.400} \times 100\% = 401,98\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{15.876.663.897}{0} \times 100\% = 0,00\%$$

Tabel 3.6
Rasio Efisiensi
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi
2020	4.825.071.488	13.966.344.484	289,45%
2021	3.652.068.400	14.680.699.835	401,98%
2022	0	15.876.663.897	0,00%

Berdasarkan data pada tabel 3.6 dapat dilihat rasio efisiensi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan rasio efisiensi masing-masing sebesar 289,45%, 401,98% dan 0,00%. Untuk tahun 2020 dan 2021 termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100% keatas, dan untuk tahun 2022 kinerja keuangannya belum bisa dihitung karena tidak adanya realisasi pendapatan yang dikarenakan peraturan daerahnya yang masih disusun.

Hal ini artinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tidak efisien dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor mampu meningkatkan pendapatan melebihi anggaran yang telah ditentukan dan mengurangi pengeluaran. Keberhasilan tidak ada artinya jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mencapai anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, hasil yang diharapkan merupakan *outcome* dan hasil yang dicapai merupakan output.

Untuk mengukur tingkat efektivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, pengukuran ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{4.825.071.488}{3.510.000.000} \times 100\% = 137,47\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{3.652.068.400}{3.744.000.000} \times 100\% = 97,54\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{0}{6.447.600.000} \times 100\% = 0,00\%$$

Tabel 3.7 Rasio Efektivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2020	3.510.000.000	4.825.071.488	137,47%
2021	3.744.000.000	3.652.068.400	97,54%
2022	6.447.600.000	0	0,00%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rasio efektivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 137,47% yang berarti dalam kategori

sangat efektif karena berada diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 97,54% yang berarti berada dalam kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 rasio efektivitasnya 0,00% kinerja keuangannya belum bisa dihitung karena belum adanya realisasi pendapatan yang dikarenakan peraturan daerahnya yang masih disusun.

Hal ini artinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dapat dikatakan efektif. Hal ini bisa dilihat dari kinerja nya yang berjalan dengan cukup baik, ditunjukkan dari nilai *outcome* dan *output* sehingga menghasilkan nilai efektivitas.

PENUTUP

Kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan metode value for money dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis selama tahun 2020-2022 sudah ekonomis karena realisasi belanja daerahnya masih dibawah anggaran belanja, namun terjadi penurunan atas kinerja nya.

Kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan metode value for money dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi selama tahun 2020-2022 belum efisien karena setiap tahunnya realisasi belanja daerahnya lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang berarti mengalami kerugian.

Kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan metode value for money dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektivitas selama tahun 2020-2022 sudah efektif karena mampu melebihi dan mendekati target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja suatu instansi kurang baik, karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.

Kinerja instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2020-2022 dapat dikatakan ekonomis dan efektif karena sudah banyak target yang telah dicapai. Akan tetapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor belum bisa dikatakan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Drs. Maruasas Sianturi, M. P.d. *Apa itu Kinerja?* (<https://www.kompasiana.com/maruasas/552ff08f6ea83413698b46f0/apa-itu-kinerja>), diakses pada tanggal 27 Mei 2023.
- Erawan, P. A., SANTOSA, M. S. W. A., Budiarta, D. K. B., & WAHYUDI, P. T. A. (2018). Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).
- Irham Fahmi, S. M. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: ALFABETA.
- Kompas. (2021). Pengukuran: Pengertian Para Ahli, Macam, Cara Penggunaan, dan Rumusnya. (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/01/153853369/pengukuran-pengertian-para-ahli-macam-cara-penggunaan-dan-rumusnya?page=all>), diakses pada tanggal 14 Mei 2023
- Manajemen Kinerja: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Syarat-Syaratnya. (<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/896-manajemen-%20kinerja-pengertian-tujuan-manfaat-dan-syarat-syaratnya>), diakses pada tanggal 19 Mei 2023
- Pengukuran. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran>), diakses pada tanggal 12 Juni 2023
- Ramadiyahati, T. (2016). *EVALUASI KINERJA KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY* (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banjarmasin).
- Rempowatu, J., & Tirayoh, V. (2016). Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten minahasa selatan Tahun 2011-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

- Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor 2018-2023. (n.d.). ([https://www.ppid.bogorkab.go.id/index.php?d=700&page_title=Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor 2018-2023](https://www.ppid.bogorkab.go.id/index.php?d=700&page_title=Renstra_Dinas_Tenaga_Kerja_Kabupaten_Bogor_2018-2023)), diakses pada tanggal 29 April 2023
- Riadi, M. (2020). Pengukuran Kinerja (Pengertian, Tujuan, Syarat, Indikator, Model dan Proses). (<https://www.kajianpustaka.com/2020/02/pengukuran-kinerja-pengertian-tujuan-syarat-model-dan-proses.html>), diakses pada tanggal 1 Juni 2023
- Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P. (2019). Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Sari, G. Y. N., Nanda, S. T., Apriliyani, I. B., & Zenita, R. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 56-65.
- Sarmiento, M. N. (2018). *ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN AIR MINUM IRA-MOR DENGAN PERUSAHAAN BEMOR DI TIMOR LESTE (STUDY KASUS PERUSAHAAN IRA-MOR DAN PERUSAHAAN BEMOR, DILI, TIMOR LESTE)*. (<http://e-journal.uajy.ac.id/16861/3/MM025052.pdf>), diakses pada tanggal 5 Juni 2023
- Sejarah dan Selayang Pandang. (<https://disnaker.bogorkab.go.id/profile/index/history>), diakses pada tanggal 28 April 2023
- Sumual, C. D., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4)